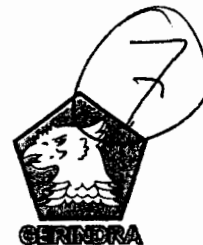




**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TERHADAP**  
**RANPERDA PERUBAHAN APBD 2011**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Senin, 25 Oktober 2011  
Juru Bicara : .....

الشكر لله على نعمه وبركاته

**Yang Terhormat :**

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Prov. Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah / Asisten / Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemprov.  
Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami  
muliakan.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya Shalawat dan Salam marilah kita aturkan pula pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita pada pintu gerbang hidayah, kemakmuran dan kemajuan bagi umat dengan mempedomani dua pusaka yakni Al-Qur'an & Sunnah kita sebagai tuntunan untuk mencapai kehidupan yang bahagia didunia dan akhirat.

Kemudian izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun 2011.

#### **Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, baik bersumber dari pendapatan asli daerah maupun penyesuaian terhadap target pendapatan dari dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah, selanjutnya adanya penyesuaian SILPA yang harus digunakan dalam tahun berjalan, yang sudah ditetapkan.

Kami melihat perubahan anggaran yang dilakukan untuk membiayai program, kegiatan dan proyek-proyek pembangunan cukup wajar dan rasional bila

dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi instansi pemakai anggaran. Walaupun demikian, kita tidak hanya untuk memenuhi keinginan menambah belanja, disebabkan adanya sisa anggaran tetapi haruslah didasarkan kepada kebutuhan yang mendesak sehingga pada gilirannya dapat pula meningkatkan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai fungsi utama pemerintahan.

Kita bersyukur atas kenaikan volume keuangan dalam perubahan APBD Tahun 2011 ini, sebagaimana disampaikan pada Pengantar Nota Keuangan Gubernur yaitu : "Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 yang semula sebesar Rp. 1.986.576.067.525,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 84.585.128.316,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,26 %, sehingga menjadi Rp. 2.071.161.195.841,- sedangkan anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp. 205.083.411.983,14 atau 9,66 %, sehingga menjadi sebesar Rp. 2.328.765.073.501,14, dengan demikian terjadi defisit anggaran tersebut ditutup dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA) yang telah ditetapkan sebesar Rp. 335.221.212.133,14 dan sisanya sebesar Rp. 77.617.334.473,- lagi dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pengalokasian tersebut diatas, maka secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 2.406.382.407.9743,14 dengan rincian anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 2.071.161.195.841,- dan anggaran penerimaan pembiayaan yang

berasal dari SILPA sebesar Rp. 335.221.212.133,14 sedangkan disisi belanja dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp. 2.328.765.073.501,14 dan alokasi pengeluaran APBD tahun 2011 tetap seimbang. Kami Fraksi Partai Gerindra Kedepannya menyarankan hal hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Gerindra menghimbau kepada semua pihak pengguna anggaran untuk bekerja keras dan berusaha mengelola keuangan secara efisien dan efektif mungkin, dengan demikian berbagai kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBD dapat mencerminkan keberpihakan kita kepada kepentingan rakyat yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Fraksi Partai Gerindra dapat memahami bahwa peningkatan pendapatan sebagaimana dikemukakan diatas adalah berkat efisiensi dan efektifitas yang dilakukan sebaliknya peningkatan pada sisi belanja haruslah dipahami sebagai peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi berbagai tuntutan yang berkembang yang harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
3. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menilai Perlunya pembenahan struktur birokrasi, dan kepegawaian, agar Agar setiap kepala SKPD daerah yang ditempatkan di masing masing SKPD merupakan orang orang yang mengerti, memahami atau ahli di bidangnya, sehingga perencanaan dan penyusunan program-program dapat terarah dan terstruktur dengan baik, dan di harapkan dapat mengkaji serta mematangkan program-program tersebut.

4. Pengalokasian dana terhadap pendidikan ~~ber~~ karakter perlunya peninjauan ulang karena kami dari Fraksi Partai Gerindra menilai Program Pendidikan ~~ber~~ karakter memerlukan pengkajian yang mendalam dan terkonsep dengan baik terlebih dahulu, agar anggaran yang kita anggarkan tidak menjadi sia sia.
5. Menyangkut sektor PAD kami menilai harus ditingkatkanya dari Badan Usaha Milik Daerah seperti Sarana Air bersih dan Grafika, hal ini dimungkinkan karena pekerjaan dan peningkatan kebutuhan, kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri, sementara Terhadap BUMN seperti PT. Semen Padang, PT. Pelindo, PT. Angkasa pura, serta sektor Swasta Nasional Seperti PT. SALAKI, dan PT. MINAJ harus diupayakan juga adanya peningkatan dan evaluasi-evaluasi penerimaannya ke depan.
6. Khusus untuk potensi tambahan pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang dalam hal ini PT. Semen Padang sebesar Rp 1.250.000.000 agar dikembalikan dan tidak diterima karena tidak sesuai dengan kometmen semula yang disampaikan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000, sikap ini perlu diambil karena hal ini telah menyinggung harga diri pemerintah daerah Prov.Sumatera Barat disamping hal tersebut pihak PT.Semen padang telah mencoba menghilangkan kewajiban yang selama ini secara tradisional telah menganggarkan/mengalokasikan Rp.10 per zak untuk sumbangan pihak ketiga kepada Prov.Sumatera Barat.
7. Bahwa dari laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 yang pada intinya copy paste dari usulan yang

disampaikan oleh Pemerintah Daerah Prov Sumatera Barat, terutama mengenai penyertaan modal dan deposito, terhadap hal ini fraksi Gerindra tetap pada pendapat sebelumnya yaitu menolak pengalokasian tersebut, namun jika Sidang paripurna ini berpendapat lain, maka harus benar-benar diawasi dan sungguh sungguh bermanfaat bagi kepentingan dalam upaya menunjang perekonomian masyarakat kita, sehingga benar-benar menjadi keputusan yang tepat dan benar untuk kondisi kita saat ini.

***Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,***

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda APBD Tahun 2011. Kami berharap semua yang kami sampaikan diatas dapat dipenuhi, maka sembari mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2011.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra semoga bermanfaat adanya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan.

***Wabillahaufik wal hidayah***

وَلَسْكَ اَلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Salam Indonesia Raya !!!!**

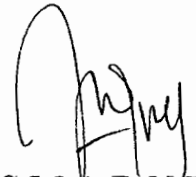
**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Wakil Ketua

  
**ZULKIFLI JAILANI, SH**



Sekretaris

  
**ISMARNI**

②

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN APBD 2011**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

Yth : Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth : Sdr. Ketua dan Wakil Ketua beserta Rekan-rekan  
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth : Sdr Kakanwil, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan  
Swasta

Yth : Sdr Pimpinan PT. Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth : Sdr. Sekda, Assisten, Tenaga Ahli, Kepala Dinas, Badan  
Biro dan Kantor dalam Lingkungan Pemda Provinsi  
Sumatera Barat

Yth : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan  
Wartawan, Hadirin dan hadirat yang kami muliakan

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, SWT Tuhan  
Yang Maha Esa. Hanya karena rahmat dan karuniaNya,  
hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam

rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2011.

Selanjutnya Syalawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya terang benderang terhadap kehidupan umat manusia hingga sekarang.

### **Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan**

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk penyampaian pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2011.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan tentang tahapan pengelolaan keuangan daerah serta di atur juga dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2011 dilakukan pembahasan Badan Anggaran.

Dari Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang



APBD Perubahan 2011 tersebut, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi berpendapat sebagai berikut :

1. Dengan waktu yang singkat ini kami minta kepada SKPD untuk bisa melaksanakan program yang betul-betul tepat sasaran dan dapat dilaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu lebih kurang 50 hari kedepan. Selain dari itu, Kinerja di lingkungan SKPD masing-masing harus lebih di optimalkan untuk melaksanakan program kegiatann yang telah direncanakan teresebut dengan memperhatikan kualitas dan efesiensinya, agar besaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) 2011 tidak seperti tahun sebelumnya.
2. Sisa Alokasi Anggaran BNPB sebesar Rp. 4.600.000.000,- yang semula dititipkan pada Pos Belanja Tidak terduga ditarik kembali sebesar Rp. 1.541.020.000,- yang digunakan untuk pengadaan sarana dan perlengkapan yang terekait dengan penanganan dan antisipasi gempa. Menurut kami, hal ini perlu pengawasan yang eksrta ketat dalam pendisrtibusiannya tepat pada sasaran serta didukung oleh data-data yang valid.
3. Meskipun BUMD-BUMD tidak mendapatkan tambahan anggaran dari anggaran perubahan ini

bukan berarti BUMD tersebut tidak bergerak untuk melaksanakan program namun sebaliknya bagaimana caranya dengan anggaran yang tersedia bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah meningkat walaupun BUMD sekarang dalam proses revitalisasi dan resposisi manajemen.

4. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan petugas di JTO, kami berpendapat bahwa walaupun ada peningkatan kesejahteraan bagi petugas JTO namun tidak otomatis menghilangkan praktek-praktek yang selama ini terjadi akan tetapi kami menyarankan agar Sdr Gubernur benar-benar serius dan sungguh-sungguh seta instens mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dilapangan. Libatkan aparat terkait untuk mengawasinya agar tidak ada lagi trik-truk kelebihan muatan maupun keluar dari timbangan.

Disisi lain, menurut kami yang perlu juga dilakukan adalah penempatan petugas di JTO harus di perhatikan, mestinya di JTO itu adalah orang-orang teruji dan mempunyai keberanian tinggi kemudian segera ganti bagi petugas-petugas yang masih berani nakal di JTO-JTO tersebut.

Dengan demikian, kalua masih terjadi praktek-praktek menyalahi aturan di JTO maka kami

menganggap Sdr Gubernur gagal dalam mengatasi masalah tersebut alangkah lebih baiknya jto di tutup saja.

5. Terkait dengan penambahan dana partisipasi dari PT. Semen Padang yang akan di tingkatkan sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Kami meminta pemerintah daerah untuk tidak serta merta menerimanya karena dana partisipasi yang kita terima selama ini nilainya dihitung berdasarkan rasio 10 rupiah per sak semen sementara penambahan yang ditawarkan tidak dikaitkan dengan peningkatan rasio dimaksud. Kami menyarankan pada Pemerintah Daerah agar mempertahankan kausul yang terkait dengan rasio dimaksud sehingga jika ada penambahan dana partisipasi dari semen padang harus berdasarkan perbaikan rasio. Misalnya, menjadi 50 rupiah per sak semen atau lebih.
6. Masih terkait dengan PT. Semen Padang, pada kesempatan yang baik ini kami juga mengingatkan agar tidak mudah mengeluarkan izin prinsip atau izin-izin lainnya. Yang dibutuhkan untuk mengembangkan pabrik dengan memanfaatkan lahan 412 Ha karena patut diduga dalam operasionalnya PT. Semen Padang saat ini tidak

sepenuhnya memungsikan filter debunya secara optimal untuk menekan biaya produksi.

Kami banyak menerima keluhan masyarakat bahwa kalau sore hari atau ketika mau hujan pabrik semen padang melepas debu tanpa saringan yang mengakibatkan mata masyarakat diradius lebih kurang 2 KM menjadi perih dan juga gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu, kami minta Pemerintah Daerah tanggap dan punya perhatian terhadap keluhan masyarakat tersebut serta mengambil langkah nyata untuk mengatasinya.

Kami juga berharap Pemerintah Daerah menjadikan isue lingkungan sebagai sebuah syarat mutlak untuk izin pemanfaatan lahan 412 Ha untuk pengembangan pabrik dan membenahi proses produksi sekarang yang ternyata membebani masyarakat di sekitar pabrik.

**Saudara gubernur, pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan**

Akhir kata, dengan mengucapkan ***bismillahirrahmanirrahim***, fraksi perjuangan reformasi **Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 menjadi APBD-P 2011.**

Demikianlah Pendapat Akhir ini, Kepada ALLAH SWT kami meminta ampun dan atas kesalahan dalam penyampaian kata kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.

**Wabillahi taufiq wal hidayah**

**Wassalamua'laikum, Wr. Wb**

Merdeka.....!

**Padang, 25 Oktober 2011**

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**



**AGUS SUSANTO**

**Sekretaris,**



**H. ILSON CONG, SE**

**Juru Bicara,**

( )

**Anggota :**

1. Rizanto Algamar ( Wakil Ketua )
2. Syahrial, B. Sc ( Bendahara )
3. Ir. Bachtul ( Anggota )



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

8

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Terhadap  
RANPERDA APBD-P TAHUN 2011**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
RABBIS RAHLI SADRI, WAYASSIRLI AMRI  
WAHLUL U'DATAN MILLISANI YAFKAHU QAULI

ASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat**
- Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD  
Propinsi Sumatera Barat**
- Yth. Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi  
Sumatera Barat**
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,  
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta, Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari pembalasan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

Dengan rasa syukur itu pula, dengan izin-Nya sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini untuk menghadiri sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Barat dengan agenda **PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANPERDA APBD-P TAHUN 2011 .**

**Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Selanjutnya Kami Fraksi PKS menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir ini.

Dari pembahasan Banggar DPRD terhadap RAPBD-P 2011 kami dapat memahami bahwa perobahan APBD 2011 sudah selayaknya dilakukan. Dan saat ini proses pembahasannya sudah sampai pada tahap akhir dimana DPRD Sumatera barat akan menyetujuinya untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Sebagai bagian dari proses tersebut Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat akhirnya, maka pada kesempatan ini Fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa hal sebelum RAPBD-P ini kita sahkan :

1. Bahwa pengesahan RAPBD-P ini bila ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku sudah melewati waktu yang

diharapkan, akibatnya proses pencairan dana dan atau pelaksanaan kegiatan yang di danai dengan APBD P ini akan di kejar waktu, untuk itu hendaknya hal ini jadi pelajaran bagi kita semua kiranya ditahun depan kita lebih baik lagi.

2. Beberapa Even/Kegiatan yang sudah pasti atau rutin yang akan dibiayai dengan dana APBD hendaknya direncanakan dengan baik seperti kegiatan olahraga, pameran budaya dan lain sebagainya sehingga dari awal dapat dialokasikan dana yang memadai jangan sampai naik di dijalan atau dipaksakan naik di jalan, hal ini akan mengganggu kegiatan yang lain.
3. Berkaitan dengan program prioritas yang telah di jabarkan dalam RPJMD 2010-2015 agar di persiapkan dan dimatangkan di tingkat eksekutif dan di sosialisasikan kepada DPRD sesegranya karena apabila pemahaman dan pengertian kita sudah sama, maka dalam aplikasi/penerapannya insyAllah tidak akan mengalami kendala.
4. Mengingat waktu yang disediakan untuk pencairan dana yang berasal dari APBD-P ini sangat singkat kami Fraksi PKS berharap Bapak Gubernur dan jajarannya agar dapat bekerja



lebih terencana dan bersabar dalam melayani rakyat karena  
sesungguhnya pemerintah itu adalah pelayan bagi rakyatnya.  
Kami berharap pemerintah daerah Sumatera Barat dapat  
memberikan pelayanan yang baik rakyat kita.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami  
muliaikan.**

Demikianlah pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan, semoga  
Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan bimbingan bagi kita semua  
dan mendapatkan curahan Rahmat-Nya, dengan mengucapkan  
bismillahirrahmanirrahim seraya mohon ampun kepada Allah SWT,  
**Fraksi PKS dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah  
APBD-P 2011** ini menjadi Peraturan Daerah.

**Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.**

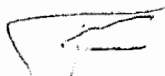
**Padang,                    27 Dzul Qo'dah 1432H  
24 Oktober 2011**

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)  
DPRD Propinsi Sumatera Barat**



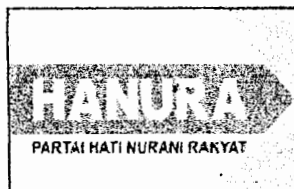
**Rafdinal. SH  
Jurubicara**

  
**Rafdinal. SH  
Ketua**

  
**Sultani, SPt, MSi  
Sekretaris**

6

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI HANURA**  
**DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**



**TERHADAP**  
**RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN 2011**

**Tanggal : 25 Oktober 2011**

**Dibacakan Oleh H. SUNARNO GANI, SH**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati :

- Saudara Gubernur, Wakil Gubernur
- Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Para Muspida, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Para Kakanwil, Kepala SKPD dan Pimpinan BUMN/BUMD
- Para Wartawan serta Seluruh Undangan yang kami muliakan

Dengan memanjatkan Puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya lah kita dapat berkumpul digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada hari ini dalam rangka Rapat Paripurna DPRD untuk Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD-P Tahun 2011.

✓ Semoga kiranya kita semua selalu berada dibawah lindungan Nya. Amin ya rabbal alamiin.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang APBD-P Tahun 2011 pada tanggal 11 Oktober 2011 yang lalu. Dengan demikian salah satu fungsi perencanaan dalam bidang anggaran dalam menjalankan roda pembangunan di Sumatera Barat ini tetap menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Setelah membaca dan mencermati terhadap jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, laporan Komisi-komisi dan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Pengantar Ranperda tentang APBD-P Tahun 2011, secara seksama. Kami dari Fraksi Partai HANURA menyampaikan beberapa butir penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam Pembahasan/Penetapan Pengantar Ranperda tentang APBD-P Tahun 2011, antara lain :

1. Secara umum, Fraksi Hanura mengapresiasi kinerja yang dilakukan saudara Gubernur dan Wakil gubernur beserta jajaran eksekutif lainnya dalam menyusun rancangan APBD – P Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2011, terutama terkait dengan perubahan asumsi pada aspek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah. Namun demikian, kami menilai, waktu dan proses pembahasan perubahan APBD 2011 ini relatif singkat di banding tahun-tahun sebelumnya, mulai penyampaian nota keuangan P-APBD sampai dengan pembahasan akhir di Banggar DPRD. Minimnya waktu yang tersedia untuk membahas perubahan APBD 2011 ini, membuat DPRD tidak memiliki cukup waktu untuk mencermati dan mengkritisi substansi materi perangkaan dalam P-APBD 2011 lebih mendalam dan detail, terlebih lagi pada proses pembahasan dengan SKPD. Minimnya alokasi waktu pembahasan tentu saja berpotensi pada produk dan kualitas hasil pembahasan P-APBD 2011, hendaknya untuk tahun yang akan datang perencanaan waktu pembahasan ditata lebih baik, sehingga menambah bobot pembahasan maupun hasilnya.
2. Kami sangat berharap pengajuan tambahan anggaran di setiap SKPD hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Sumatera barat, terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat Sumbar saat ini. Kebijakan APBD-P Sumbar harus benar-benar termanifestasikan dalam kebijakan belanja daerah.
3. SILPA pada P-APBD 2011 dinilai masih cukup besar, sehingga mengesankan perencanaan yang kurang baik, hendaknya angka SILPA ke depan secara bertahap diminimalisir sampai pada angka yang lebih proporsional, yakni dengan melakukan perencanaan program dan anggaran yang lebih terencana, objektif, dan terukur. Lebih khusus lagi, mendorong setiap SKPD untuk segera merealisasikan kegiatan dan anggaran-anggaran belanja langsung yang terkait dengan kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang telah ditetapkan bersama.

4. Anggaran APBD-P ini harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang aktual dan strategis, yang antara lain dikonsentrasikan pada: perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, infratraktur jalan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan harus mendapat perhatian terus-menerus, karena sektor ini adalah sektor strategis yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sumbar, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat dan kecerdasan masyarakat Sumbar. Dalam struktur APBD, sektor ini masih dinilai kurang mendapat alokasi anggaran yang kurang memadai. Padahal bidang ini sudah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Sumbar. Salah satu langkah utama dan strategis dalam mengentaskan kemiskinan, mewujudkan masyarakat yang sehat dan mencerdaskan masyarakat adalah dengan menciptakan kebijakan program dan anggaran yang berpihak pada petani/sektor pertanian dan pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan paparan kami diatas, maka kami dari Fraksi Partai HANURA menyampaikan ***Dapat Menerima*** Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan bahwa pembangunan di Sumatera Barat dapat menghasilkan hasil guna yang tinggi.

Kami dari Fraksi Partai Hanura meminta Pemerintah transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan dan komitmen bersama. Yaitu tidak menghendaki penambahan atau pengurangan anggaran lagi setelah APBD-P 2011 ini disahkan. Dan dapat memanfaatkan waktu yang tersisa di 2011 secara maksimal sehingga penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Lebih lanjutnya, agar pelaksanaan dan implementasi anggaran yang telah kita tetapkan tersebut dapat di terapkan dengan baik, pada kesempatan ini kembali kami ingatkan kepada unit kerja perangkat daerah pengguna anggaran supaya dapat melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektifitas anggaran serta ~~ketetapan~~ **KETEPATAN**

waktu pelaksanaannya. Dengan harapan apa yang menjadi sasaran kegiatan dapat tercapai secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

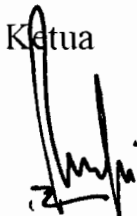
Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Demikian disampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai HANURA terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud hendaknya di bumi tercinta ini. Amiiin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahittaufig wal hidayah  
Wassalamualaikum Wr Wb.

Padang, 25 Oktober 2011

Ketua



H. Sunarno Gani, SH



Sekretaris



Dedy Edwar, SE, MM

**Pendapat Akhir**  
**Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)**  
**Tentang :**  
**Perubahan APBD Tahun 2011**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Oktober 2011

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media  
Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Banggar DPRD dan TAPD yang telah membahas Rancangan Perubahan APBD 2011 ini secara marathon setelah disepakati KUA PPAS Perubahan APBD 2011 yang lalu. Namun demikian kita perlu menyadari bersama bahwa waktu pembahasan Perubahan APBD tersebut terasa agak terlambat jika dibandingkan dengan waktu Pembahasan Perubahan APBD 2010 yang lalu.

Oleh karena itu kami mengharapkan agar dimasa yang akan datang kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah waktu tersebut, agar hal-hal yang sangat mendasar terutama yang berkaitan dengan aturan dan mekanisme pembahasan APBD sesuai dengan koridor.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Dari segi substansi perubahan kami dapat memahami bahwa adanya peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pendapatan penerimaan pembiayaan dapat kita tampung secara proporsional dan bahkan cukup mengesankan.

Pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.986.576.067.525 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp.84.585.126.316 sehingga menjadi Rp.2.071.161.195.841

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.1.086.756.029.022 mengalami peningkatan sebesar Rp.60.547.740.934 sehingga menjadi sebesar Rp.1.147.303.769.956
- b. Dana perimbangan ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.894.605.038.503 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.035.840.000 sehingga menjadi sebesar Rp.897.640.878.503,-



- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.5.215.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp.21.001.547.382 sehingga menjadi sebesar Rp.26.216.547.382,-
- d. Penerimaan Pembiayaan Semula sebesar Rp.211.585.495.480,- meningkat menjadi Rp. 335.221.212.133,14,- dimana terdapat penambahan dana dari sisa lebih perhitungan yang lalu sebesar Rp. 123.635.716.653,14,-

Peningkatan pendapatan daerah tersebut sebenarnya masih bisa ditingkatkan apabila sumbangan dari pihak ketiga bisa kita garap dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitan itu kami mengharapkan agar Saudara Gubernur dapat melakukan lobi tingkat tinggi ke kementerian BUMN dan kementerian Keuangan untuk bisa mendorong PT. Semen Padang meningkatkan sumbangan partisipasinya dari keinginannya untuk menyumbang sebesar Rp. 1.250.000.000,- begitu juga kepada PT. Pelindo yang tidak punya niat sama sekali untuk memberikan bantuan kepada APBD kita, padahal PT. Pelindo dan jaringan Perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasanya telah memberikan keuntungan yang cukup besar kepada PT. Pelindo disatu sisi, sedangkan disisi lain mereka telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh APBD Propinsi Sumatera Barat.

Kemudian kami juga menyarankan agar Saudara Gubernur melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan-perusahaan Kelapa Sawit dan perkebunan lainnya yang besar agar mereka juga memberikan dana partisipasinya pada APBD Sumatera Barat dimasa-masa yang akan datang.

Mengenai tambahan penerimaan pembiayaan yang hanya bersumber dari dana sisa lebih perhitungan yang lalu sebesar Rp. 123.635.716.653,14,- memang dari satu sisi terlihat sebagai hasil dari efisiensi dan efektifitas Anggaran, tetapi disisi lain juga memperlihatkan belum mantapnya perencanaan dalam berbagai aspek pendanaan pembangunan dan bisa dikhawatirkan mengurangi kualitas hasil proyek-proyek pembangunan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Memperhatikan belanja daerah, kami dapat memahami tidak adanya perubahan. Sedangkan adanya pergeseran-pergeseran pada beberapa pos belanja baik terhadap belanja langsung maupun terhadap pos belanja tidak langsung dapat kami pahami sebagai tindakan rasionalisasi yang dilakukan, agar manfaat dari penggunaannya sesuai dengan harapan kita bersama.

Dari beberapa pergeseran yang dilakukan terhadap belanja tidak langsung kami sangat mendukung disediakannya bantuan hibah kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Unggul Cendikia Kabupaten Agam sebesar Rp.250.000.000,-.

Dalam kesempatan ini kami berterimakasih kepada Bapak Dr. H. Bakhtiar Chamsyah yang telah bersusah payah mendirikan sekolah tersebut sampai menjadi sekolah yang sekarang cukup mempunyai sistem pendidikan yang berkualitas dan telah melahirkan lulusan-lulusan unggul yang sangat berkualitas. Oleh karena itu kami menghimbau agar kita memberikan perhatian serius untuk semakin meningkatnya eksistensinya sebagai sekolah unggul yang cukup banyak menampung siswa-siswa unggul dari kalangan masyarakat tidak mampu yang diharapkan akan mampu pula memberikan sumbangsinya terhadap masyarakat bangsa dan negara.

Begitu pula kami sangat mendukung pengalihan <sup>→ kembali</sup> anggaran untuk peningkatan pengelolaan Istana Bung Hatta sebesar Rp. 1.100.000.000,- karena menurut hemat kami sarana dan prasarana dan sistem pengelolaan istana Bung Hatta ini harus semakin berkembang sehingga Nama Bung Hatta sebagai Icon Nasional dan salah seorang Proklamator Kemerdekaan kita harus kita jaga Marwahnya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,  
Dengan mengucapkan kalimat dan ridha  
Setelah memperhatikan berbagai peraturan sebagai landasan hukum  
perubahan APBD Tahun 2011, begitu juga dengan mekanisme pembahasan  
yang dilakukan yang menurut hemat kami telah sesuai dengan ketentuan Tata  
Tertib DPRD maka Fraksi PPP dapat menyetujui perubahan APBD Tahun 2011  
yang struktur dan rinciannya telah di laporkan oleh Badan Anggaran DPRD kami  
dan membawa dengan  
dapat menerimanya untuk dijadikan sebagai peraturan daerah. F. PPI

Demikian lah pendapat akhir Fraksi PPP ini kami sampaikan. Kami  
mohon maaf Bila dalam penyampaian nya ada hal-hal yang kurang berkenan.  
Terima kasih atas perhatian nya.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

وَبِاللّٰهِ تَوْفِيقٍ وَهِدَايَةٍ

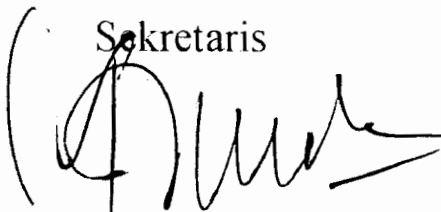
Padang, 25 Oktober 2011

Fraksi PPP  
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua

  
Dedrizal

Sekretaris

  
Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

---



# **PENDAPAT AKHIR**

## **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **TERHADAP**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

## **TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN**

## **PENDAPATAN Dan BELANJA DAERAH**

## **(APBD) TAHUN 2011**

*Disampaikan Oleh: Hj. Artati, SH*  
*Padang: Selasa, 25 Oktober 2011*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD  
Propinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan , Asisten, Staf Ahli,  
Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah  
Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

Yth. Pimpinan Partai Politik, Wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia.

Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya jua kita bersama-sama hadir dalam sidang paripurna yang mulia ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dapat menjadi *uswah* dan *qudwah* dan telah memberikan arah dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al – Qur'an dan sunnah-Nya.

***Saudara Gubernur, Pimpinan, dan Anggota serta Hadirin yang berbahagia!***

Fraksi PAN mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir semoga apa yang akan kami sampaikan memberikan kontribusi yang amat berarti bagi kita semua, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah bekerja maksimal siang dan malam

tanpa mengenal lelah, semoga menjadi ibadah bagi mereka. Amiin  
Ya Rabbal 'Alamin...

**Saudara Gubernur, Pimpinan, dan Anggota serta Hadirin yang berbahagia!**

Setelah mempelajari kesimpulan Rapat – rapat Badan Anggaran dengan Tim Panitia Anggaran Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 2 (dua) hari penuh siang dan malam, bahwa Pendapatan terjadi peningkatan menjadi **Rp. 84.585.126.316,-** *.(Delapan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah)* dengan peningkatan pendapatan tersebut dapat menampung beberapa kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung .

Berdasarkan hal tersebut diatas perubahan anggaran adalah hal yang seharusnya dilaksanakan guna memanfaatkan peningkatan pendapatan yang ada sehingga dana yang tersedia di APBD digunakan secara efektif jika perubahan itu tidak dilakukan, sejumlah uang akan mengendap di kas daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak namun dengan perubahan ini hal tersebut dapat di hindari .

Berdasarkan hal yang sebutkan diatas kami dari Fraksi PAN memberikan komentar, saran dan pendapat sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah masih memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi terutama dari sector pajak dan restribusi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

- pajak restribusi, diharapkan saudara gubernur dapat berkordinasi dengan walikota dan bupati.
2. Pendapatan lain-lain yang sah agar saudara gubernur dapat mengali lebih maksimal kontribusi hibah dari pihak ketiga termasuk dana partisipasi dari BUMN-BUMD yang beroperasi diwilayah Sumatera Barat, seperti PT Pelindo , PLN dan PT semen Padang.
  3. Hibah dari PT.Rajawali 52 Milyar yang di depositokan untuk dana Pendidikan agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kriteria yang layak dan pantas.
  4. Fraksi PAN sekali lagi menyarankan berhubung kasif dan singkatnya waktu yang tersedia setelah Perubahan APBD tahun 2011 ini ditetapkan tidak ada lagi birokrasi berbelit-belit dalam pencairan keuangan untuk kegiatan masing-masing SKPD, khususnya untuk belanja public.

***Saudara Gubemur, Pimpinan, dan Anggota serta Hadirin yang berbahagia!***

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan di atas, maka Fraksi Partai Amanat Nasional dengan memohon ridho pada Allah SWT dan dengan mengucapkan "***Bismillaahirrahmaanirrahlim***" dapat menerima dan menyetujui **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah (APBD) Tahun 2011 untuk dijadikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini kami sampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang tepat dalam

penyampaian ini kami mohon dimaafkan, dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi amal usaha kita. Amin..

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Padang, 25 Oktober 2011

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

  
**Ir. Israr Jalinus**



**Sekretaris,**

  
**Hj. Artati, SH**

**Juru Bicara**

  
**Hj. Artati, SH**

Penasehat Fraksi	: H.M.Asli Chaidir
Wakil Ketua Fraksi	: Muzli. M,Nur, S.Pd
Bendahara Fraksi	: Indra Dt. Rajo Leli, SH.MM
Anggota Fraksi	: Hj. Lela Pujianti





**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 59328 Padang 25133



3

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Disampaikan Oleh:  
H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَسْأَلُكُمْ عَلَى كُرْهٍ وَرَحْمَةِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdri. Ibu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD. dan Para Kepala PTN/PTS.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati;**

Alhamdulillah Robbil Alamin Berkat Hidayah, Rahmah serta Inayah dari Allah SWT, pada hari ini tanggal 25 Oktober 2011 kita kembali dapat melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011. *Yang diwakili oleh Jutan Masyahat SUMBAR di LIRI Jekong 1M*  
Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada teladan kita, pemimpin terpercaya nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati;**

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir di ruang sidang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian terima kasih kami sampaikan pula kepada Badan Anggaran yang telah melakukan beberapa kali pembahasan secara sungguh-sungguh hingga sampai ke tahap akhir, semoga kerja keras tersebut menjadi amalan dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, Amin....

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati;**

Dan seterusnya sebelum Fraksi Kami menyampaikan sikap akhir, perkenankanlah kami menyampaikan secara garis besar APBD Perubahan tahun 2011 ini. Seperti sama-sama kita ketahui terjadi perubahan APBD 2011 ini karena adanya perkembangan yang tidak sesuai ~~yang tidak sesuai~~ dengan yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS 2011. Seperti adanya peningkatan pendapatan daerah dan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2010 yang ditetapkan pada APBD 2011, kemudian adanya sisa tender yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD serta menampung pergeseran anggaran SKPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah pada APBD 2011.

Adapun besar penambahan pendapatan pada APBD perubahan 2011 ini sebesar Rp. 84.585.126.316 sehingga total pendapatan pada APBD 2011 nantinya menjadi Rp. 2.071.161.195.841. akibat penambahan pendapatan konsekuensi logisnya akan bertambah belanja daerah, dimana penambahan belanja daerah ini betul-betul dipergunakan untuk mencapai sasaran target yang ada pada APBD 2011. Sebagaimana yang diamanahkan pada RPJMD 2010-2015. Adapun jumlah belanja pada APBD Perubahan 2011 ini menjadi Rp. 2.328.765.073.501,14 dimana terjadi penambahan belanja sebesar Rp. 205.083.411.983,14. Dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tidak langsung menjadi Rp. 1.152.316.471.132,14 atau bertambah sebesar Rp. 35.106.258.197,14 dan belanja langsung menjadi Rp. 1.176.448.602.369. *Bertambah, sebesar Rp. 169.977.153.786.*

Untuk menutup defisit APBD Perubahan diambil dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari peningkatan SILPA pada APBD 2010 sebesar Rp. 123.635.716.653,14 sehingga SILPA menjadi Rp. 335.221.212.133,14. Untuk itu Fraksi kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

beserta jajarannya atas kerja kerasnya dalam memacu peningkatan pendapatan daerah.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami muliakan;**

Kemudian izinkan juga kami menyampaikan <sup>aspirasi</sup> kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga atas rencana dilaksanakannya try out Pra UAN pada akhir tahun ini sehingga kita dapat lebih awal memantau sampai sejauh mana kesiapan anak didik kita untuk melaksanakan UAN pada 2012<sup>1</sup> nantinya. Kemudian kami menyarankan supaya dilaksanakan try out kedua minimal satu bulan sebelum pelaksanaan UAN 2012<sup>1</sup> nantinya.

Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan atas kesamapahaman dengan kami tentang pengelolaan pendidikan karakter dimana pada perubahan 2011 ini kita siapkan anggaran untuk <sup>pelaksanaan</sup> pendidikan karakter pada tahun 2012<sup>1</sup> dalam bentuk seminar, lokakarya dan kajian terhadap pelaksanaan pendidikan karakter. Sehingga pada tahun 2012 kita betul-betul siap untuk melaksanakannya dan Fraksi kami siap mendukung pelaksanaan pendidikan karakter ini.

Dan selanjutnya kami menyarankan kepada TAPD beserta jajarannya tidak satupun program yang terelaminir seperti Bansos dan Hibah serta kegiatan lainnya yang telah kita sepakati pada APBD Perubahan 2011 ini. Dan kami sarankan supaya APBD Perubahan ini bisa cepat dinikmati oleh masyarakat, kami harapkan APBD yang telah kita tetapkan hari ini sudah dibawa ke Jakarta untuk dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri dan kita harapkan awal <sup>NOVEMBER</sup> ~~Desember~~ telah bisa direalisasikan untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya.

Kemudian saran kami selanjutnya dalam rangka pembahasan APBD 2012 nanti, data base PNS sudah betul-

betul akurat sehingga kita betul-betul mampu menghitung pembiayaan-pembiayaan secara proporsional.

Berdasarkan hal-hal yang kami ungkapkan<sup>dan</sup> diatas, tidak ada alasan dari Fraksi kami, untuk tidak menyetujui APBD Perubahan 2011 ini, maka dengan berserah diri kepada Allah SWT, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2011 ini. *Semoga ALLAH SWT Mem berikan MYA AMIN - Ya ALLAH -*  
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar tentang APBD Perubahan 2011 ini, mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada Saudara Ketua untuk menandatangani keputusan nantinya. Kami akhiri dengan banyak maaf dan terima kasih atas perhatian.

**Wabillahittaufiq Walhidayah**

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 25 Oktober 2011

**FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



**ZULKENEDI SAID, S.SOS**

*dtg*  
**DRA. SITTI IZZATI AZIZ**

**Juru Bicara**



**H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

*Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190*

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas Badan/  
Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta  
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang  
senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita  
semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi  
Sumatera Barat,dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap  
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran  
2011 .

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

***Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur, Anggota DPRD, MUSPIDA, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.***

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 .

***Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur, Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.***

Setelah mendengar membaca dan memperhatikan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011, kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan baik dari PAD, Dana Perimbangan dan lain – lain. Pendapatan Daerah yang sah telah dibahas untuk kegiatan – kegiatan di SKPD maka kami mengharapkan agar seluruh pendapatan – pendapatan yang di tamping dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 tersebut dapat di manfaatkan dan dipergunakan serta dilaksanakan sebaik – baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dimasa yang akan datang untuk dapat terus ditingkatkan.

Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2011 bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sampai bulan Agustus 2011 **rata-rata dibawah** 70 % kecuali PKB 71,46 % dan BBNKB 83,24% sedangkan PBB-KB dicapai hanya 53,24 % Pajak air Permukaan 41,54 % iustru diperkirakan hanya 62.30%.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah diperkirakan terjadi kenaikan sebesar Rp. 84.585.128.316,- atau 4,26 % dan dihubungkan dengan dengan waktu tersedia sampai akhir tahun anggaran hanya tinggal 2 bulan, kami **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Pemerintah Daerah dengan seluruh SKPD perlu kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai target tersebut .

Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Syah berasal dari PT. Semen Padang <sup>Karena</sup> ~~dalam rancangan perubahan APBD tahun 2011 tidak ada perubahan tetap sebesar Rp. 1.500.000.000. walaupun pada 12 juli 2011 telah ada kesediaan PT. Semen Padang untuk menambah sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 1.250.000.000, yang merupakan tambahan,~~ tidak ada kesesuaian besaran yang dijanjikan pihak manajemen PT. Semen Padang, dan disepakati belum dimasukkan dalam Perubahan APBD, kami **Fraksi Partai Demokrat** mendukung untuk itu dan selanjutnya diminta Sdr. Gubernur melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen PT. Semen Padang agar bisa merealisasikan apa yang telah dijanjikan.

Penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan antara lain direncanakan berasal dari PT. ATS, PT. Grafika, dan PT. Dinamika terjadi penurunan yang sangat besar dan signifikan kami **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat terhadap Perusahaan Milik Daerah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya perlu ditingkatkan Kinerjanya sehingga menjadi perusahaan yang kwalifait atau dilikwidasi / diserahkan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta.

**Sdr.Pimpinan Sidang, Gubernur, Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.**

2. Pada sisi Anggaran Belanja terjadi kenaikan sebesar Rp.35.106.258.197,14 dari anggaran awal sebesar Rp.2.123.681.661.518.-menjadi p.2.328.765.073.501,14.-yang dipergunakan untuk :



a. Belanja Tidak Langsung semula dianggarkan sebesar Rp.1.117.210.212.935,- mengalami kenaikan sebesar Rp.35.106.258.197,14,- menjadi sebesar Rp.1.152.316.471.132,14,-

Khusus Belanja Pegawai terjadi Pengurangan sebesar Rp. 34.250.553.000,- dari anggaran semula Rp. 566.925.357.330,- menjadi sebesar Rp. 532.674.804.330,- kami **Fraaksi Partai Demokrat** berpendapat, bahwa terjadinya kebijakan tersebut adalah menunjukkan bahwa aparatur yang melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 awal belum Proporsional hanya dengan estimasi atau Perkiraan-perkiraan yang tidak mempergunakan dan didukung data yang akurat sehingga terjadi kekeliruan ,maka diharapkan kedepan agar apartur dapat bekerja dengan landasan Data Base yang kwalifid , lengkap , utuh dan dapat dipercaya.

b. Belanja Langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.006.471.448.583,- mengalami peningkatan sebesar Rp.169.977.153.786,- sehingga menjadi Rp.1.176.448.602.369,- kami **Fraaksi Partai Demokrat** berpendapat:

- Urusan Pendidikan yang mengalami kenaikan sebesar RP.3.382.096.667.-dengan harapan terjadi peningkatan mutu dan kualitas proses belajar-mengajar yang dilaksanakan guru yang sebagian telah bersertifikasi dengan dukungan dana dan juga disediakan sejumlah dana tambahan sebesar Rp.835.000.000.-untuk tambahan penghasilan guru yang diharapkan berdampak positif dalam proses belajar mengajar dan kepada anak didik terjadi peningkatan kualitas.

- Urusan Kesehatan yang mengalami kenaikan sebesar Rp.3.378.226.000.-yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat.Dari hasil Pemeriksaan BPK-RI APBD 2010,Unit Rumah Sakit Daerah mempergunakan sendiri Retribusi secara Langsung tanpa menstorkan kepada Kas Daerah,adalah Kesalahan Proses Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya tidak terjadi apabila aparatur mengerti dan mau melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan tidak lagi terjadi masa yang akan datang dan kepada aparatur tersebut diberi teguran.
  - Urusan Otonomi Daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp.15.386.065.454.-yang direncanakn untuk peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur, Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai peningkatan tentu dengan harapan terjadi perbaikan dan peningkatan aparatur Daerah yang dari Evaluasi 70 % aparatur kurang Professional dibidangnya,akan berubah menjadi aparatur yang professional dan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan hasil yang baik.
  - Urusan Pertanian yang mengalami peningkatan sebesar Rp.5.484.628.100.-dan Urusan Kehutanan yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp.270.798.700.-Dalam melaksanakan Program lingkup Pertanian dan Kehutanan memerlukan waktu relative lama dan Cuaca yang mendukung, dihadapkan dengan waktu hanya 2 bulan maka terhadap SKPD yang berangkutan diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan tekhnis yang ada.
3. Untuk Yayasan Pendidikan Minangkabau, yang sampai saat ini belum ada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah akan di apakan, kami berpendapat agar sesegera mungkin di selesaikan pemasalahannya, sehingga Yayasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya dan apabila tidak bermanfaat untuk masyarakat dalam membantu pendidikannya, keberadaan Yayasan tersebut perlu ditinjau ulang.

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan adanya kegiatan baru dan juga kegiatan yang telah dilakukan, kami mengingatkan agar jangan terjadi di akhir tahun Anggaran tidak terealisasi dengan baik, serta kegiatan - kegiatan fisik harus tetap menjaga kualitas pekerjaan.

**Sdr.Pimpinan Sidang, Gubernur, Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.**

Demikianlah beberapa pendapat yang perlu kami sampaikan dari **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011.

Dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" kami Fraksi Partai Demokrat dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan catatan dan harapan yang kami sebutkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kami menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan dan mengucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Padang 25 Oktober 2011

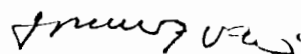
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Ketua,**



**H.M.NURNAS.ST**

**Sekretaris,**



**H.SUWIRPEN SUIB**

Penasehat : IR.H. YULTEKHNIL. MM

Wakilketua : IR.H.ARKADIUS DT.INTAN BANO.MM.MBA.

Anggota :

1. LISWANDI.SE.
2. H.BUZARMAN.ST.
3. H.NOVRIL ANAS.
4. H.NOFRIZON
5. ERMAWATI TANJUNG
6. HJ.ZAHARA HASNI.
7. ELDI SUTRISNO.DT.INTAN BATUAH.
8. HASRANITA.SH.MH.
9. DRS.SYAMSUL BACHRI YAHYA DT.LUBUK BANDARO
10. H.DODI DELVI SE